

Penjelasan:

DRAF PETA PROSES BISNIS KEMENPANRB

Disiapkan Khusus untuk:



Jakarta, 25 September 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 79

Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



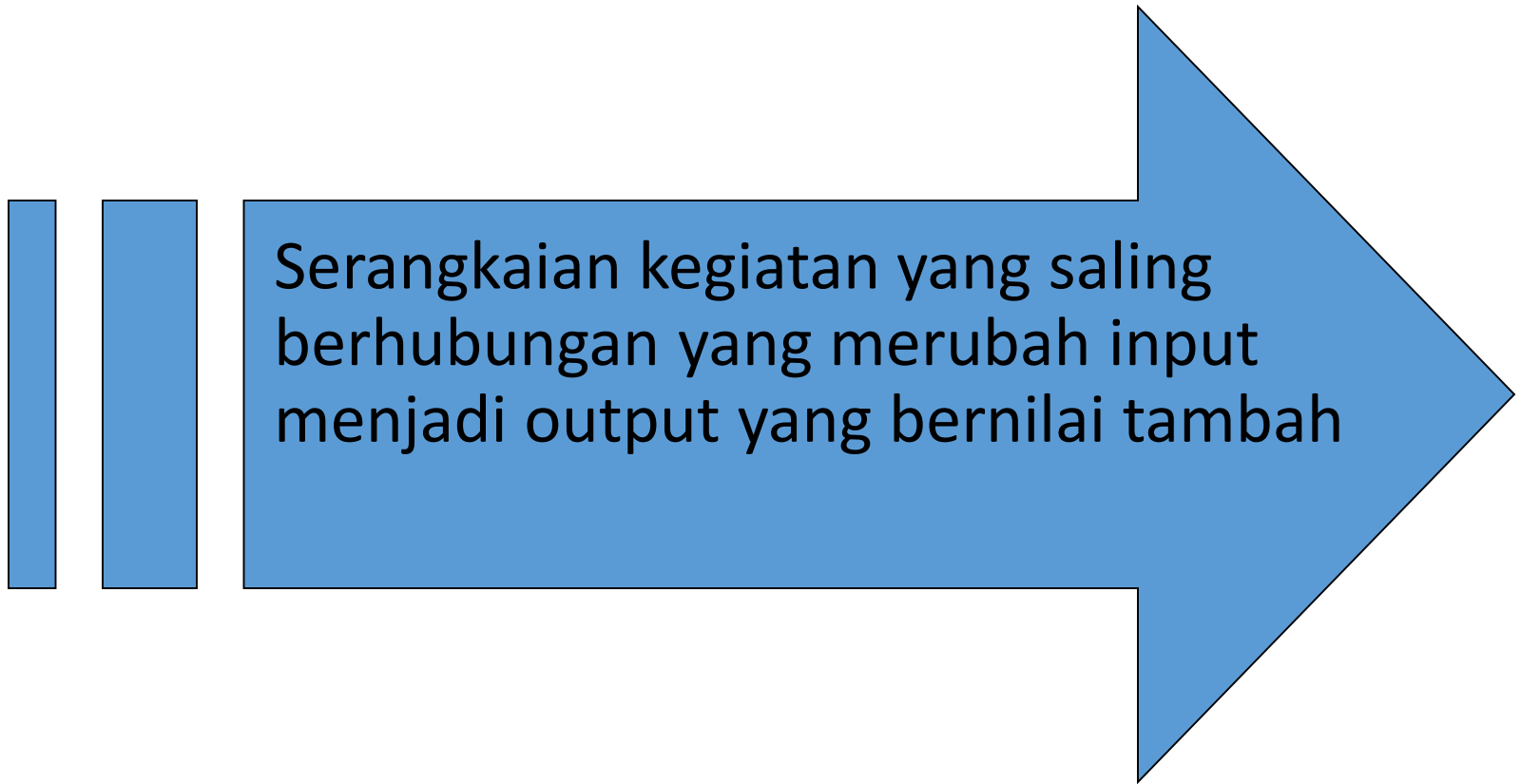
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

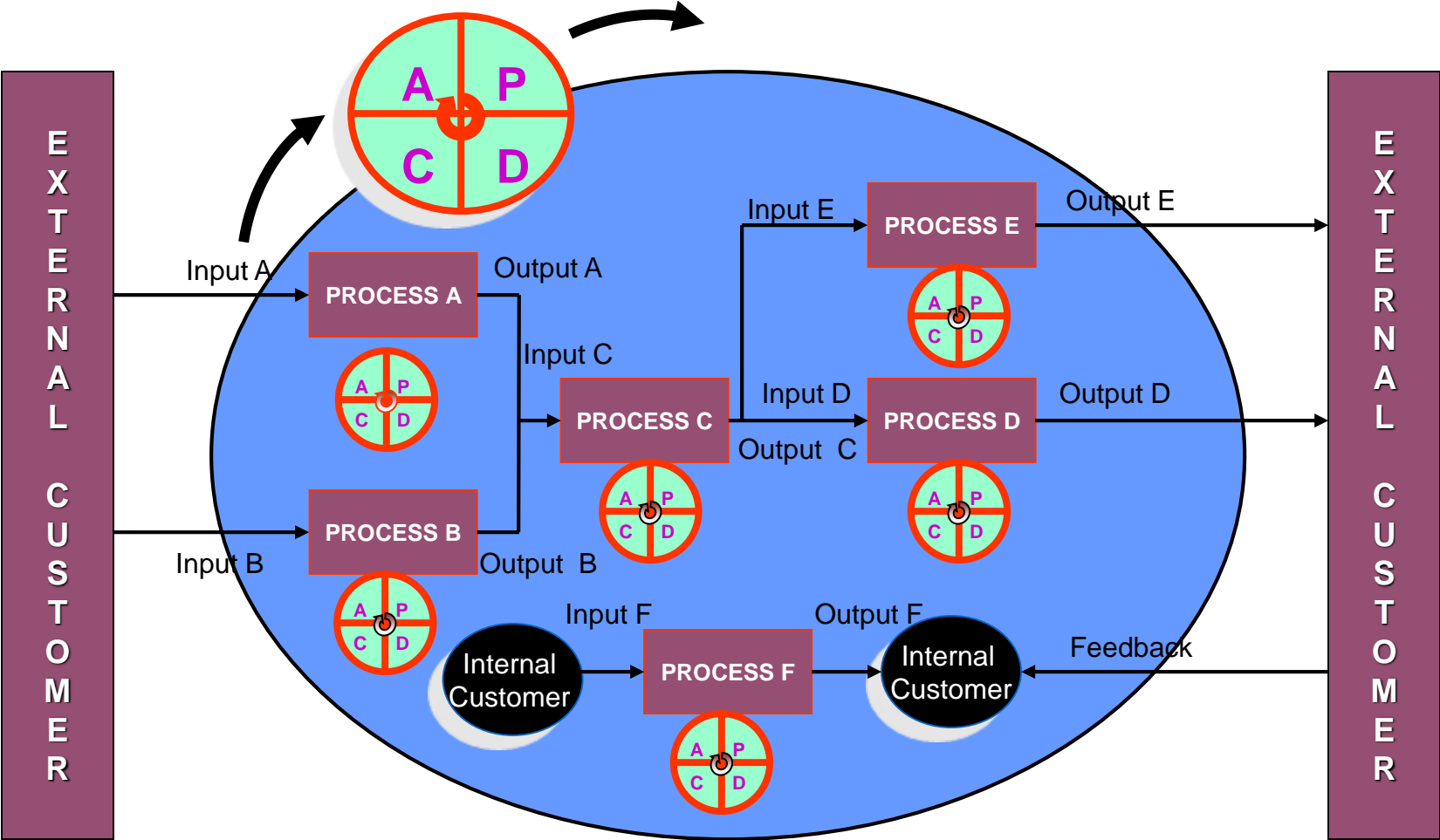
Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

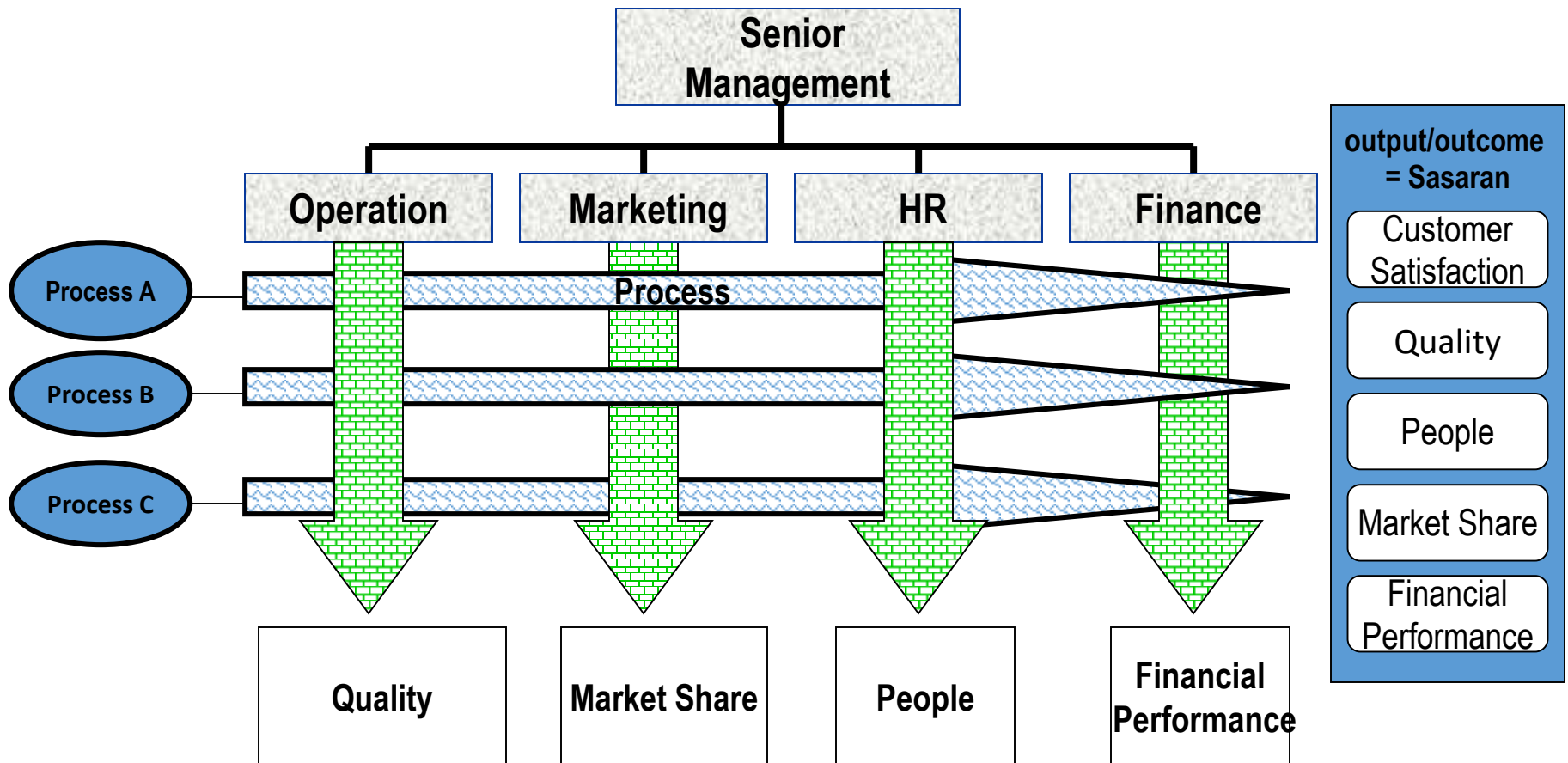
DEFINISI PROSES



TYPICAL NETWORK OF INTERACTING PROCESSES

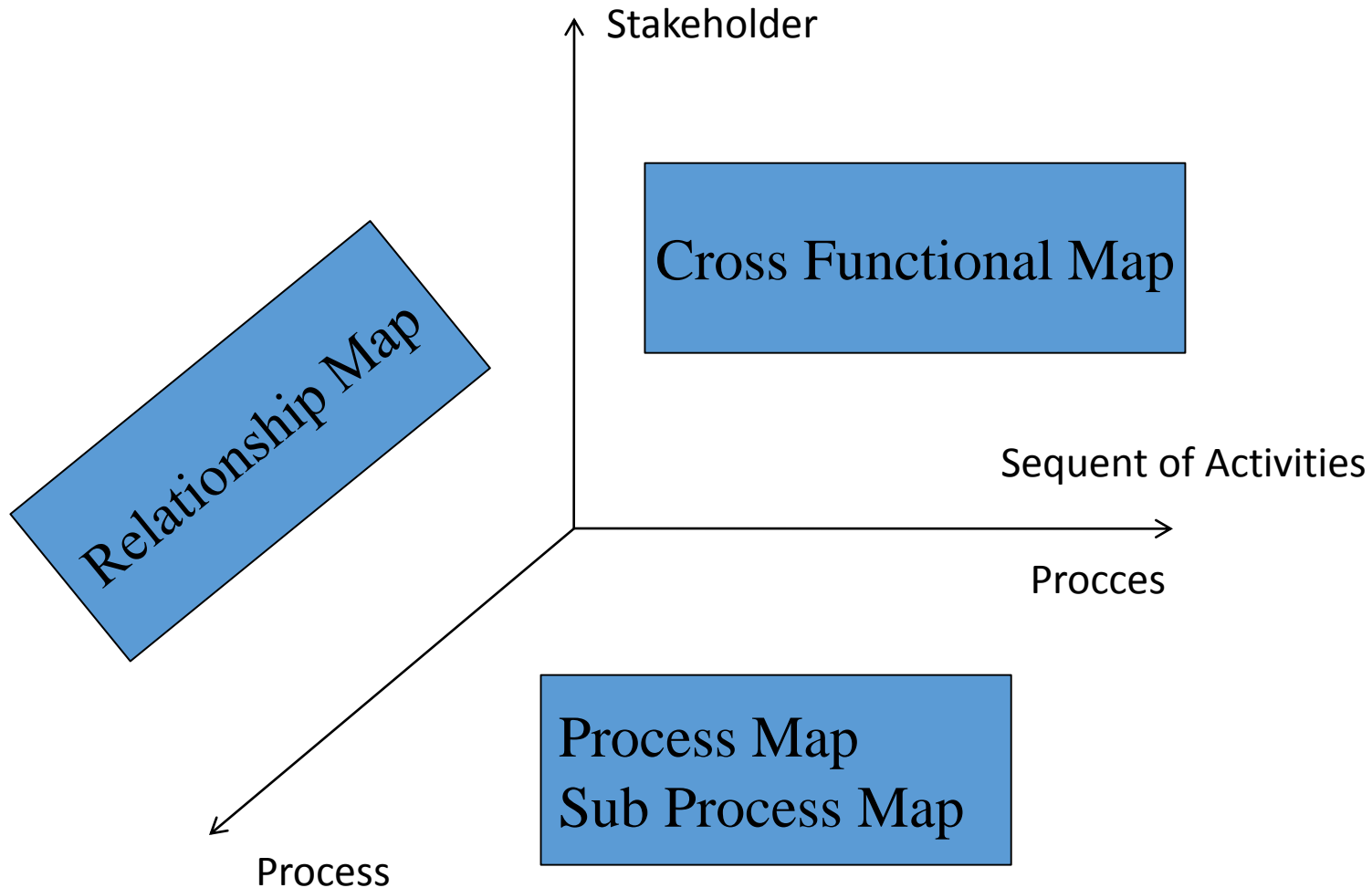


Pengertian Proses

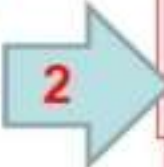


Proses merupakan rangkaian kegiatan lintas unit kerja

Process Map Frame Work



TAHAP PERTAMA MENETAPKAN:
PETA BISNIS PROSES
DAN SUB PROSES



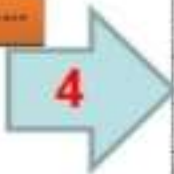
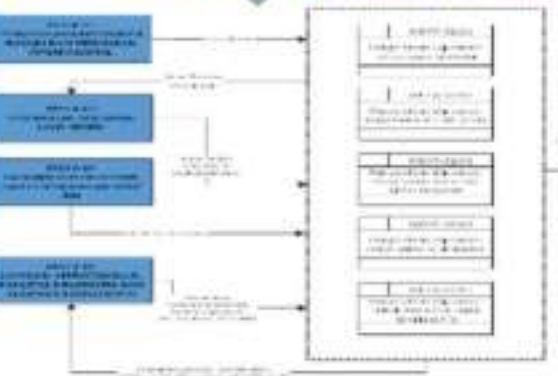
TAHAP KEDUA MENETAPKAN:
PETA HUBUNGAN DAN LINTAS FUNGSI



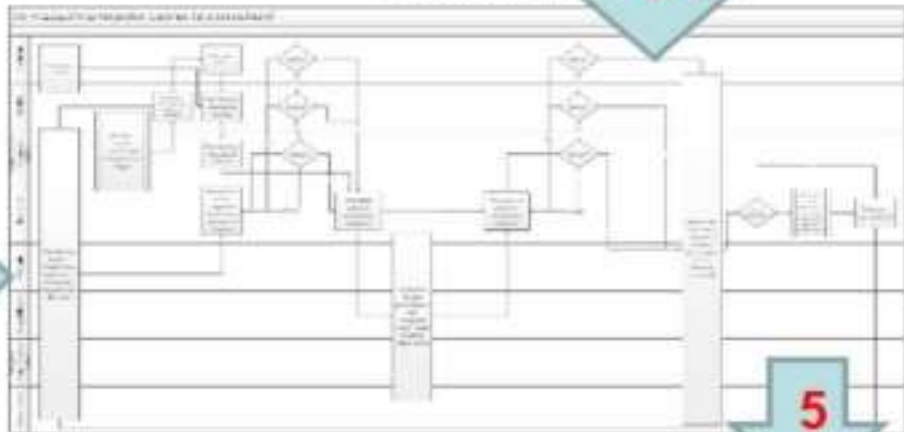
1

PETA ALIRAN

MOFA-02 PENGELUARAN DOKUMEN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL



PETA LINTAS FUNGSI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOFA-02-01-01-001
NAMA SOP : Pengeluaran Dokumen Kerjasama Internasional
HALAMAN : 1 dari 2



No	Revisi	Revisi Baru	Revisi Lama	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOFA-02-01-01-001
NAMA SOP : Pengeluaran Dokumen Kerjasama Internasional
HALAMAN : 1 dari 2



No	Revisi	Revisi Baru	Revisi Lama	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi



DRAFT PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PANRB

PAN-01
Perumusan
Kebijakan
PANRB

PAN-02
Pengelolaan
Kelembagaan
Pemerintah

PAN-03
Pengelolaan
SDM Aparatur

PAN-04
Pengelolaan
Akuntabilitas
dan Budaya
ASN

PAN-05
Pengelolaan RB
Nasional dan
Administrasi
Pemerintahan

Proses Utama

Proses Pendukung

PAN-06
Pengelolaan
Kinerja dan
Anggaran
Kemen PANRB

PAN-07
Pengelolaan
Informasi,
Publikasi, dan
Komunikasi
Publik

PAN-08
Pengelolaan
SDM dan
Organisasi
Kemen PANRB

PAN-09
Pengelolaan
Layanan
Hukum,
Administrasi,
dan Umum

PAN-10
Pengelolaan Sistem
Pengendalian dan
Pengawasan
Kemen PANRB

- Peta Proses KEMENPANRB merupakan gambar yang merepresentasikan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam Kementerian PANRB, yang dikelompokkan menjadi 5 proses utama dan 5 proses pendukung.
- Setiap proses (10 proses) yang ada di KEMENPANRB merupakan milik semua unit kerja yang ada di dalam Kementerian PANRB yang mencerminkan hubungan horizontal antar unit Kerja tsb, yang detailnya dapat dilihat pada CFM.

01

Proses Utama

PAN 01 Perumusan Kebijakan PANRB

PAN.01.01
Analisis Isu-isu
Strategis dan
Kajian Kebijakan

PAN.01.02
Formulasi dan
Rekomendasi
Kebijakan

Pemahaman konseptual:

- Kebijakan merupakan produk (hasil kerja) dari KEMENPANRB, yaitu regulasi (Permen atau PP) yang mengikat K/L/Pemda sebagai customer.
- Rangkaian kegiatan dalam menghasilkan kebijakan diasumsikan SERUPA terlepas substansi kebijakannya berbeda sesuai dengan wewenang KEMENPANRB yang tercermin di setiap kedeputian.

Lingkup proses:

1. Analisis isu-isu strategis dan kajian kebijakan merupakan rangkaian kegiatan kajian atas dinamika eksternal dan internal terhadap operasional K/L/Pemda. Triger/input rangkaian kegiatan ini dapat merupakan permintaan pemerintah (Presiden), atau hasil evaluasi kebijakan, atau masalah yang terjadi di lapangan.
2. Formulasi dan rekomendasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan menghasilkan kebijakan, mulai dari penyusunan draft kebijakan, pembahasan melibatkan stakeholder, sampai penerbitan kebijakan.

Pemahaman konseptual:

- Salah satu substansi tuisi KEMENPANRB adalah pengelolaan organisasi K/L/Pemda, dimana obyek dari rangkaian kegiatan pada proses ini merupakan komponen organisasi instansi pemerintah beserta sistem operasional organisasi yang diperlukan.

Lingkup proses:

1. Penataan organisasi merupakan rangkaian kegiatan analisis sampai penetapan organisasi K/L/Pemda.
2. Standarisasi Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan penyusunan sistem operasional organisasi K/L/Pemda dalam menjalankan fungsi organisasi untuk melayani stakeholder.
3. Analisis Jabatan dan Beban Kerja merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari pengelolaan organisasi K/L/Pemda menjadi organisasi yang efektif dan efisien (right sizing)
4. Evaluasi Jabatan merupakan rangkaian kegiatan menganalisa peta jabatan bagi organisasi K/L/Pemda

PAN 02 Pengelolaan Kelembagaan Pemerintah

PAN.02.01
Penataan
Organisasi

PAN.02.02
Standarisasi
Pelayanan Publik

PAN.02.03
Analisis Jabatan
dan Beban Kerja

PAN.02.04
Evaluasi Jabatan

Pemahaman konseptual:

- KEMENPANRB merupakan subsystem dalam pengelolaan ASN. Rangkaian kegiatan yang menjadi tuisi KEMENPAN RB dijabarkan dalam beberapa subproses pengelolaan SDM Aparatur

PAN 03 Pengelolaan SDM Aparatur

PAN.03.01
Perencanaan dan
Penerimaan ASN

PAN.03.02
Peningkatan
Kompetensi ASN

PAN.03.03
Pengembangan
Karir dan Talenta
ASN

PAN.03.04
Peningkatan
Kesejahteraan
SDM Aparatur

Lingkup proses:

1. Perencanaan dan Penerimaan ASN merupakan rangkaian kegiatan koordinasi, sinkronisasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan ASN.
2. Peningkatan Kompetensi ASN merupakan rangkaian kegiatan sinkronisasi dan koordinasi terkait kompetensi ASN
3. Pengembangan Karir dan Talenta ASN merupakan rangkaian kegiatan analisis, sinkronisasi, koordinasi dalam pelaksanaan manajemen karir dan jabatan ASN.
4. Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur merupakan rangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kesejahteraan ASN

PAN-04
Pengelolaan Akuntabilitas dan Budaya ASN

PAN.04.01
Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP)

PAN.04.02
Peningkatan Nilai
Dasar ASN

PAN.04.03
Penguatan
integritas ASN

PAN.04.04
Penegakan
Disiplin

PAN.04.05
Layanan
Pengaduan

Pemahaman konseptual:

- Proses ini merupakan gabungan antara pengelolaan sisi keras (hard approach) dan sisi lunak (soft approach) dari kinerja ASN

Lingkup proses:

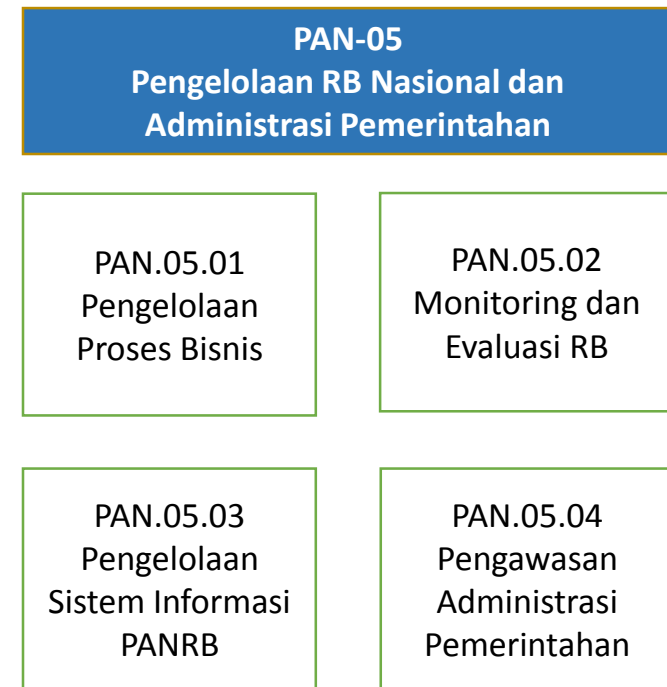
1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan SAKIP yang mengikat K/L/Pemda.
2. Peningkatan Nilai Dasar ASN merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan norma dan nilai ASN.
3. Penguatan integritas ASN merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan sistem integritas ASN
4. Penegakan Disiplin merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan tindakan terhadap pelanggaran disiplin ASN
5. Layanan Pengaduan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pengaduan yang diterima dari masyarakat serta tindaklanjutnya

Pemahaman konseptual:

- KEMENPANRB sebagai Kementerian yang menjadi koordinator pengelolaan RB Nasional yang berperan dalam peningkatan efektifitas administrasi pemerintahan

Lingkup proses:

1. Pengelolaan Proses Bisnis merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan intra dan inter instansi pemerintah (K/L/Pemda)
2. Monitoring dan Evaluasi RB merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan efektifitas pelaksanaan RB di instansi pemerintah (K/L/Pemda)
3. Pengelolaan Sistem Informasi PANRB merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan data base / knowledge management terkait efektifitas instansi pemerintah (K/L/Pemda)
4. Pengawasan Administrasi Pemerintahan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan efektifitas pelaksanaan administrasi instansi pemerintah (K/L/Pemda)



02

Proses Pendukung

PAN 06
Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
Kemen PANRB

PAN.06.01
Perencanaan
kinerja dan
anggaran

PAN.06.02
Pengelolaan
Perbendaharaan

PAN.06.03
Pengelolaan
Keuangan

PAN.06.04
Pengelolaan
monitoring dan
evaluasi kinerja
dan anggaran

Pemahaman konseptual:

Proses ini merupakan dukungan dalam rangka efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sesuai program dan kegiatan dalam internal KEMENPANRB

Lingkup proses:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran merupakan rangkaian aktifitas internal KEMENPANRB dalam menyusun perencanaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun/ditetapkan.
2. Pengelolaan perbendaharaan merupakan rangkaian kegiatan atas pengeluaran keuangan dari anggaran yang telah ditetapkan
3. Pengelolaan Keuangan merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas perencanaan serta pelaporan keuangan
4. Pengelolaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran adalah rangkaian kegiatan dalam melakukan monitor, evaluasi atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran keuangan serta tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah dilakukan

Pemahaman konseptual:

- Proses pengelolaan atas informasi, publikasi atas kebijakan/peraturan serta komunikasi publik ini menunjukkan dukungan atas tata kelola pemerintahan terutama Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Lingkup proses:

1. Layanan Informasi dan publikasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menyediakan dan memberikan informasi serta pelaksanaan publikasi atas kegiatan maupun kebijakan/peraturan
2. Pelayanan Media merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan dukungan publikasi dengan media, mulai dari peliputan, analisis media dan pemberitaan.

PAN 07 Pengelolaan Informasi, Publikasi, dan Komunikasi Publik

PAN.07.01
Layanan
Informasi dan
Publikasi
(Website,
Perpustakaan,
dll)

PAN.07.02
Pelayanan Media
(Press Release)

PAN 08
Pengelolaan SDM dan Organisasi
Kemen PANRB

PAN.08.01
Pengadaan SDM

PAN.08.02
Pengembangan
dan Pembinaan
SDM

PAN.08.03
~~Human~~
~~Resources~~
~~Information~~
~~System~~
IHRMS
(Integrated Human
Resources
Management
System)
(administrasi
kepegawaian)

PAN.08.04
Pemetaan Proses
Bisnis dan
Penataan
Organisasi
Kementerian
PANRB

Pemahaman konseptual:

Proses ini merupakan dukungan atas pengelolaan SDM (sumber daya manusia) yang IPA (integritas, profesional dan akuntabel) serta pengelolaan organisasi efektif efisien dalam internal KEMENPANRB.

Lingkup proses:

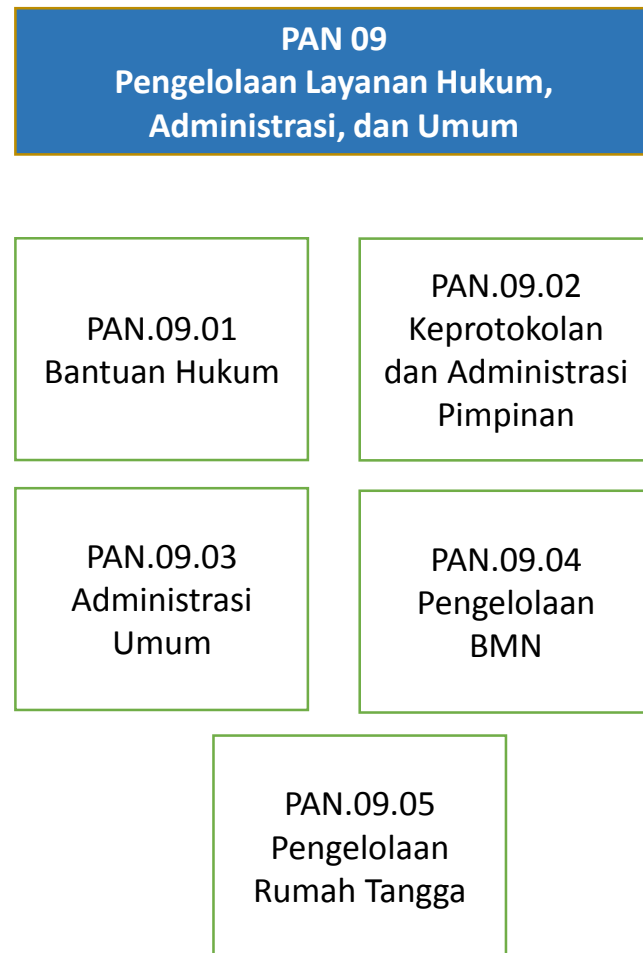
1. Pengadaan SDM merupakan rangkaian kegiatan penyediaan atas kebutuhan SDM aparatur, baik dari luar (rekrutmen) maupun dari dalam organisasi (mutasi)
2. Pengembangan dan pembinaan merupakan rangkaian kegiatan pembinaan dan disiplin SDM, pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) serta pengembangan karir
3. IHRMS (Integrated Human Resources Management System) merupakan rangkaian kegiatan seluruh keadministrasian SDM Aparatur yang diintegrasikan dalam aplikasi
4. Pemetaan proses bisnis dan penataan organisasi Kementerian PANRB merupakan rangkaian kegiatan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal.

Pemahaman konseptual:

Merupakan proses gabungan dukungan hukum, administrasi dan umum dalam rangka pelaksanaan operasional internal KEMENPANRB

Lingkup proses:

1. Bantuan Hukum merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan advokasi hukum, baik litigasi maupun non litigasi.
2. Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, protokol, keamanan dan tata usaha pimpinan
3. Administrasi umum merupakan rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan sarana prasana
4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan penggunaan, inventarisasi dan pemeliharaan BMN.
5. Pengelolaan Rumah Tangga merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan urusan sanitasi lingkungan, akomodasi dan konsumsi serta kebersihan



PAN 10
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan Kemen PANRB

PAN.10.01
Pengawasan dan
Pengendalian
Internal

PAN.10.02
Pengelolaan
Koordinasi APIP
Dengan
Pengawas
Eksternal

Pemahaman konseptual:

Proses ini merupakan penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergi

Lingkup proses:

1. Pengawasan dan pengendalian internal merupakan rangkaian kegiatan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi dan lain-lain.
2. Pengelolaan koordinasi APIP dengan pengawas eksternal merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan sinergitas antara pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat dan penegakan hukum